



Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Pendidikan Anak untuk Mengatasi Angka Putus Sekolah

Suardin^{1*}, Maryam Nurlaila², Siti Rahmalia Natsir¹, Nur Elyana Eka¹, Hamid³

¹Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Buton

²Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Buton

³Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Muhammadiyah Buton

¹suardinmuh78@gmail.com*

Artikel History:

Received: 9 Februari 2026/ Received in revised form: 13 Februari 2026 / Accepted: 21 Februari 2026

ABSTRACT

Limited public awareness of the importance of children's education has contributed to persistently high school dropout rates. This community engagement program aimed to enhance public understanding and awareness of children's education. The program employed a participatory approach through structured socialization and educational activities involving parents of school dropouts, education stakeholders, school principals and teachers, and village government officials. The results demonstrate a substantial improvement in participants' understanding of the delivered materials, with comprehension levels increasing from 48.9% before the program to 84.2% after its implementation, representing an increase of 35%. The most pronounced improvement was observed in collaborative dropout prevention strategies. These findings indicate that the program effectively strengthened public awareness of the importance of synergy and collaboration among families, schools, communities, and government institutions in supporting the sustainability of children's education.

Keywords: Community Empowerment; School Dropout Children; Importance of Children's Education; School Participation

ABSTRAK

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak berdampak pada tingginya angka anak putus sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang pendidikan anak. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan strategi sosialisasi dan edukasi kepada orang tua anak putus sekolah, masyarakat pemerhati pendidikan, kepala sekolah dan guru, dan pemerintah desa, sebagai peserta. Hasil pengabdian diperoleh bahwa terdapat peningkatan signifikan pemahaman masyarakat atas materi yang diberikan yakni tingkat pemahaman peserta sebelum kegiatan sebesar 48,9% dan setelah kegiatan menjadi 84,2% atau meningkat sebesar 35%. Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek strategi pencegahan kolaboratif. Menunjukkan bahwa kegiatan ini dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam keberlanjutan pendidikan anak.

Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat; Anak Putus Sekolah; Pentingnya Pendidikan Anak; Partisipasi Sekolah

*Suardin

Email:suardinmuh78@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan (RI, 2017). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Pasal 12 menjelaskan bahwa Ayat (1) Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar. (2) Setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya. (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar (Kemensesneg, 2008).

Peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa setiap warga negara usia sekolah wajib mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan wajib menyediakan layanan pendidikan bagi setiap anak, untuk memenuhi hak-hak anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Ayat 1 menjelaskan bahwa Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Kemensesneg, 2014; Adha, dkk., 2024). Proses pendidikan merupakan program penting bagi tumbuh kembang anak, tidak hanya proses memperoleh pengetahuan tetapi juga menjadi sarana pembentukan kepribadian anak. Pendidikan akan menjadi penyelamat pengetahuan, moral dan karakter generasi muda dan menjadi bukti bahwa baik atau tidaknya sumber daya manusia dalam suatu wilayah (Wahyuni, dkk., 2023). Untuk itu, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh pemangku kepentingan melakukan usaha-usaha penanganan/mengentaskan terhadap anak putus sekolah.

Anak putus sekolah masih menjadi isu dan masalah serius bagi bangsa Indonesia, khususnya diberbagai daerah kawasan terpencil atau dengan kondisi sosial-ekonomi yang kurang mendukung. Kasus anak putus sekolah di Indonesia potensial masih terus terjadi dengan berbagai faktor penyebabnya (Afrianti, 2024). Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) cut off 30 November 2024 yang diolah Pusdatin Kemendikdasmen jumlah siswa putus sekolah tertinggi berada di jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 38.540 (0,16%). Adapun tingkat Sekolah Menengah Pertama sebanyak 12.210 siswa (0,12%). Sedangkan Sekolah Menengah Atas sebanyak 6.716 siswa (0,13%), dan SMK sebanyak 9.391 siswa (0,19%). Siswa putus sekolah tertinggi pada jenjang sekolah Dasar karena jumlah siswa SD terbesar, akan tetapi secara persentase, SMK memiliki angka putus sekolah tertinggi (Mappapa, 2025).

Beberapa faktor penyebab terjadinya anak putus sekolah, menurut Keleden yaitu dipengaruhi oleh faktor dalam diri anak (internal) dan faktor dari lingkungan sosial anak (eksternal). Faktor internal yaitu rendahnya minat atau kemauan anak untuk bersekolah, sekolah dianggap tidak menarik dan ketidakmampuan dalam mengikuti pelajaran, dan faktor eksternal yaitu ekonomi keluarga, kurangnya perhatian orang tua, lingkungan bermain anak dan jauhnya jarak antara rumah dan sekolah (Syahrianti, 2022). Pandangan lain menyebutkan bahwa faktor yang cukup signifikan mempengaruhi anak putus sekolah adalah faktor pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, kemiskinan, dan daerah tempat tinggal atas akses pendidikan (Hajrani & Batia, 2021; Kusnady Tabsir, 2022). Pendapat senada dijelaskan bahwa aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak kurang mampu masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun geografi (Hamdanesti, 2025).

Orang tua yang berpenghasilan rendah seringkali lebih memilih anaknya untuk bekerja membantu ekonomi keluarga daripada melanjutkan pendidikan. Hal ini didorong oleh adanya pandangan bahwa pendapatan yang dihasilkan anak usia sekolah, sangat membantu bagi kehidupan keluarga (Wardani, dkk., 2021). Selain itu, faktor utama yang juga menyebabkan anak putus sekolah adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak dan tidak memahami manfaat pendidikan jangka panjang, sehingga membuat orang tua tidak memprioritaskan pendidikan untuk anak-anaknya (Ridwan, dkk., 2020). Sejalan pendapat di atas, dijelaskan bahwa penyebab tingginya anak putus sekolah adalah kendala ekonomi dan minimnya kemampuan dari orangtua peserta didik. Sedangkan faktor lain yang menjadi penyebabnya seperti keinginan untuk bekerja, membantu orang tua, dan akses menuju kesekolah yang jauh (Lestari, Kurniawan, & Ardi, 2020). Pandangan senada

juga ditemukan bahwa penyebab anak putus sekolah adalah (1) kondisi sosial orang tua terdiri dari pendidikan dan pekerjaan orang tua; (2) kondisi ekonomi orang tua terdiri dari penghasilan orang tua dan beban tanggungan orang tua; (3) psikologi anak yang terdiri dari minat/motivasi anak, lingkungan dan kesehatan (Wardani *et al.*, 2021).

Data BPS Kabupaten Buton yang dimuat dalam perencanaan jangka panjang daerah tercatat bahwa masalah anak putus sekolah terjadi pula pada beberapa Desa di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk wilayah kabupaten Buton terdapat 8 desa di Kabupaten Buton mengalami angka putus sekolah dengan kategori tinggi, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah Atas (SMA). Secara jelas sebaran angka partisipasi murni berdasarkan jenjang pendidikan ditunjukkan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Angka Partisipasi Murni Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	99,05	98,60	99,85	99,30	99,41
2	SMP/MTs	77,23	80,08	80,25	78,91	73,93
3	SMA/MA	68,60	69,11	69,78	70,47	64,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Tahun 2024

Data tabel di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2023 Angka Partisipasi Murni Pada jenjang SD pada kategori sangat baik yaitu 99,41% dengan asumsi terdapat 0,59% anak tidak bersekolah. Pada jenjang SMP/MTs terjadi penurunan partisipasi sekolah (73,93%) dengan asumsi 26,07% anak tidak bersekolah, dan pada jenjang SMA/MA turun menjadi 64,24% dengan asumsi 35,76% anak tidak bersekolah (Peraturan Daerah, 2025). Keadaan ini menuntut adanya upaya penanganan yang serius bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun insan akademis, dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.

Berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi anak putus sekolah, yakni dapat bersifat upaya pencegahan (preventif) dan berupa menyembuhkan (kuratif). Usaha-usaha pencegahan anak putus sekolah dapat dilakukan melalui berbagai upaya meliputi sosialisasi, pemberian beasiswa, kunjungan ke rumah siswa dan kontrol izin sekolah (Ranti, dkk., 2019). Upaya pencegahan lainnya adalah membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dengan juga mengajak anak berdiskusi dua arah, serta memberikan motivator supaya anak mempunyai tekad yang kuat dalam menjalankan pendidikannya hingga jenjang yang tinggi (Nuraeni & Setiawan, 2023).

Adapun upaya penanggulangannya dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan dan melibatkan pemangku kepentingan terkait, yaitu: upaya dari orang tua, upaya dari lingkungan sekitar, dan upaya dari dinas pendidikan (Andani, dkk., 2023). Upaya penanganan anak putus sekolah dapat pula dilakukan melalui bantuan program PKBM oleh perangkat kelurahan/desa. Oleh karena itu, partisipasi aktif perangkat kelurahan/desa dalam menangani masalah anak-anak terputus sekolah sangat penting, agar anak usia sekolah memiliki kesempatan untuk mendapatkan ijazah dan kemudian memperoleh pekerjaan yang layak (Ailsyah Putri Oktaviani & Adi Soesiantoro, 2023). Penanggulangan anak putus sekolah juga dapat dilakukan dengan cara meningkatkan peran orang tua dan peran sekolah (Syahrianti, 2022). Upaya ini dapat diwujudkan melalui peningkatan pemahaman orang tua, kampanye kesadaran publik, serta dukungan dari pemerintah dan kelompok masyarakat untuk memprioritaskan pendidikan bagi anak-anak.

Oleh karena itu kegiatan ini dilakukan untuk membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait tentang pentingnya pendidikan anak, guna mengambil langkah penting dalam membangun masa depan generasi mendatang yang lebih baik dengan cara mengatasi anak putus sekolah. Bentuk kegiatan ini berupa sosialisasi dan edukasi kepada orang tua anak putus sekolah, tokoh masyarakat, kepala sekolah, dan guru, dengan memberikan materi penguatan tentang; (1) pentingnya pendidikan bagi masa depan anak; (2) dampak anak putus sekolah; (3) peran orang tua dalam pendidikan; (4) strategi pencegahan dan penanganan kolaboratif pemangku kepentingan terkait. Pemilihan pemangku kepentingan sebagai subyek dalam kegiatan ini karena dipandang cukup memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya dan menangani anak putus sekolah.

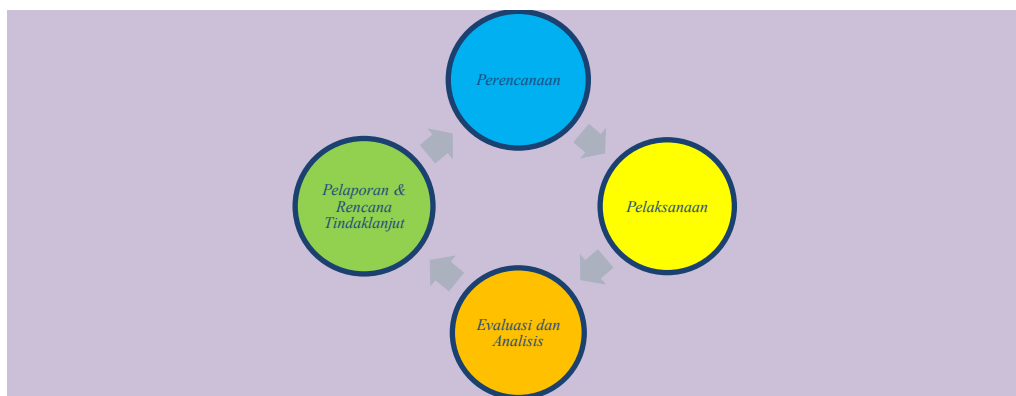
Adapun target luaran yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini, dirumuskan sesuai dengan capaian tujuan materi sosialisasi dan edukasi, yaitu; meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan (orang tua, kepala sekolah dan guru, pemerintah desa dan tokoh masyarakat) akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak dan memahami peran masing-masing dalam mencegah dan menangani anak putus sekolah, baik peran sendiri-sendiri maupun peran secara kolaboratif.

Kegiatan pengabdian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan betapa pentingnya peran pemangku kepentingan dalam memfasilitasi penanganan anak putus sekolah. Berdasarkan hasil penelitian Alves & Bataha (2022) menyimpulkan bahwa pentingnya peran fasilitator puspaga balai RW dalam membantu permasalahan anak putus sekolah. Selain itu warga dapat dengan secara terbuka melaporkan ataupun mengeluhkan permasalahan warga terkait perempuan dan anak. Namun demikian, kajian-kajian terdahulu lebih menekankan pada penguatan peran orang tua anak putus sekolah atau beberapa elemen saja, sementara dalam kajian ini menyasar seluruh elemen pemangku kepentingan terkait dalam bidang pendidikan. Untuk itulah pengabdian ini dirancang tidak hanya membangun pemahaman orang tua anak putus sekolah, melainkan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan sebagai penggerak dan fasilitator dalam mengawal keberhasilan program pengentasan anak putus sekolah pada 8 (delapan) desa sasaran, yakni orang tua anak putus sekolah, pemerintah desa, kepala sekolah, guru, dan unsur masyarakat pemerhati pendidikan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan peranserta kolaboratif para pemangku kepentingan terkait di setiap desa sasaran dalam mengatasi masalah anak putus sekolah, yang berimplikasi pada meningkatnya angka partisipasi sekolah di Kabupaten Buton.

2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2025 di Aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Buton, dengan pendekatan partisipatif, edukatif, persuasif, dan kolaboratif, dan kemitraan bersama Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Buton. Subyek dalam kegiatan ini berjumlah 40 orang, utusan dari perwakilan delapan desa di Kabupaten Buton dengan tingkat kasus putus sekolah tertinggi terdiri atas: masyarakat putus sekolah, orang tua anak putus sekolah, unsur pemerintah desa, Kepala Sekolah, guru, dan pemerhati pendidikan.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi, menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus, dengan memanfaatkan media pendukung/bahan tayang (poster, PPT, dan Video). Tujuan kegiatan yaitu terbentuknya pemahaman dan kesadaran masyarakat/orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, dan terbangunnya peran kolaboratif pemangku kepentingan terkait, dalam upaya meningkatkan angka partisipasi sekolah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan dijalankan dalam empat siklus yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan analisis, dan pelaporan dan rencana tindak lanjut, dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PkM

Guna efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, ditetapkan pembagian kerja Tim, dengan peran dan tugas masing-masing sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1 berikut.

Tabel 2. Uraian Pembagian Peran Tim

Unsur Tim	Uraian Peran Tim
Ketua Tim	- Bertanggung jawab atas penyusunan proposal PkM dan perencanaan kegiatan secara menyeluruh. - Bertanggung jawab atas koordinasi, pemetaan, dan survey serta pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan strategis bersama mitra penyelenggara. - Mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana dan tujuan. - Menjadi narasumber sosialisasi dan advokasi dalam pelaksanaan PkM - Menjadi penanggung jawab administrasi, monev, dan laporan kegiatan.
Anggota Tim (Dosen)	- Membantu Ketua Tim dalam menyusun proposal PkM dan merumuskan perencanaan kegiatan - Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan PkM. - Memberikan pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan. - Terlibat aktif dalam proses evaluasi, analisis dan penyusunan laporan kegiatan serta rencana tindak lanjut program
Anggota Tim (Mahasiswa)	- Membantu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan advokasi kepada peserta. - Mengumpulkan data lapangan dan membantu penyusunan dokumentasi kegiatan. - Berkontribusi dalam evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan akhir serta rencana tindak lanjut program

Untuk mengukur tujuan kegiatan ini, digunakan analisis data deskriptif kuantitatif sederhana yakni persentase.

3. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Perencanaan

Pada tahapan ini, aktivitas yang dilakukan tim yaitu koordinasi, pemetaan data, survey, secara jelas dapat diuraikan sebagai berikut.

- 3.1.1 Koordinasi: tim melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Buton sebagai mitra, untuk memvalidasi data anak putus sekolah di wilayah Kabupaten Buton, dengan berbagai karakteristiknya.
- 3.1.2 Pemetaan data: tim melakukan analisa data dan pemetaan karakteristik daerah anak putus sekolah, dan menetapkan beberapa elemen masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di delapan desa sebagai subyek pengabdian, serta merumuskan segala administrasi, media dan bahan materi sosialisasi dan edukasi.
- 3.1.3 Survey: tim melakukan survey lokasi dan mengkonsolidasi segala persiapan kelengkapan kegiatan, bersama Bidang PAUD-PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.

3.2. Pelaksanaan

Tim melaksanakan sosialisasi dan edukasi orang tua anak putus sekolah dan pemangku kepentingan terkait menggunakan metode ceramah, tanya jawab, studi kasus dan diskusi (FGD). Adapun materi yang disajikan yaitu: (1) pentingnya pendidikan bagi masa depan anak; (2) dampak anak putus sekolah; (3) peran orang tua dalam pendidikan anak; (4) mengelola masalah sosial dan budaya; (5) strategi pencegahan dan advokasi kolaboratif pemangku kepentingan terkait terhadap anak putus sekolah.

Pada sesi ini peserta sangat antusias mengikuti paparan materi dan aktif bertanya dan menyampaikan pendapat, serta mengajukan berbagai studi kasus penyebab anak putus sekolah. Dari

berbagai studi kasus yang disampaikan peserta tersebut, sehingga menambah bahan analisis dalam forum diskusi untuk dipecahkan jalan penyelesaiannya, ditambah dengan pemantik studi kasus yang disiapkan oleh narasumber.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan PkM

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian

Tim melakukan evaluasi kegiatan dengan mengukur tingkat pemahaman peserta menggunakan pre-test dan post-test, diskusi terarah, serta observasi partisipatif selama kegiatan berlangsung, selanjutnya hasilnya dianalisis secara deskriptif kuantitatif sederhana (persentase). Evaluasi juga dilakukan dengan menilai kesesuaian antara perencanaan dan implementasi kegiatan dari beberapa aspek kegiatan sebagai bahan masukan untuk rencana tindak lanjut. Dari hasil evaluasi diperoleh data bahwa terdapat peningkatan signifikan pemahaman peserta pada seluruh aspek materi yang disampaikan, sebagaimana diuraikan berikut.

3.3.1. Pemahaman tentang Pentingnya Pendidikan bagi Masa Depan Anak

Sebelum kegiatan PkM dilaksanakan, diperoleh hanya 53% peserta yang memiliki pemahaman baik mengenai peran pendidikan dalam membentuk masa depan anak, khususnya terkait peluang kerja, pengembangan karakter, dan mobilitas sosial. Setelah penyampaian materi dan diskusi interaktif, persentase peserta dengan pemahaman baik meningkat menjadi 85,5%, atau mengalami peningkatan sebesar 30,5%.

3.3.2. Pemahaman tentang Dampak Anak Putus Sekolah

Hasil pre-test menunjukkan bahwa 45,5% peserta memahami dampak negatif anak putus sekolah, seperti meningkatnya risiko pengangguran, kemiskinan, pernikahan dini, dan perilaku menyimpang. Setelah kegiatan, tingkat pemahaman meningkat menjadi 81,5%, dengan kenaikan sebesar 36%, yang menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi jangka panjang anak putus sekolah.

3.3.3. Pemahaman tentang Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak

Pada awal kegiatan, hanya 57% peserta yang menyadari secara komprehensif peran orang tua sebagai pendamping, motivator, dan pengambil keputusan dalam pendidikan anak. Pasca kegiatan PkM, pemahaman ini meningkat menjadi 90,5%, atau mengalami peningkatan sebesar 33,5%, yang ditunjukkan melalui komitmen peserta untuk lebih aktif memantau dan mendukung pendidikan anak di rumah.

3.3.4. Pemahaman dalam Mengelola Masalah Sosial dan Budaya

Pemahaman peserta mengenai pengaruh faktor sosial dan budaya, seperti kemiskinan, norma kerja dini, dan rendahnya pendidikan orang tua terhadap angka putus sekolah pada awalnya berada pada angka 48%. Setelah pemberian materi dan studi kasus, tingkat pemahaman meningkat menjadi 81%,

atau naik sebesar 33%. Peserta mulai mampu mengidentifikasi faktor lokal yang memicu putus sekolah dan cara mengelolanya secara bijak.

3.3.5. Pemahaman tentang Strategi Pencegahan Kolaboratif Pemangku Kepentingan

Sebelum kegiatan, hanya 41% peserta yang memahami pentingnya kolaborasi antara orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah anak putus sekolah. Setelah kegiatan PkM, pemahaman peserta meningkat menjadi 83%, atau mengalami kenaikan sebesar 42%, yang merupakan peningkatan tertinggi dibandingkan aspek lainnya. Hal ini terlihat dari munculnya inisiatif peserta untuk membentuk komunikasi rutin dengan pihak sekolah dan perangkat desa.

Tabel 3. Deskripsi Tingkat Pemahaman Peserta Terhadap Materi

Aspek Materi	Pre Test	Post Test	Peningkatan
Pentingnya Pendidikan bagi Masa Depan Anak	53%	85,5%	30,5%
Dampak Anak Putus Sekolah	45,5%	81,5%	36%
Pemahaman tentang Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak	57%	90,1%	33,5%
Mengelola Masalah Sosial dan Budaya	48%	81%	33%
Strategi Pencegahan Kolaboratif Pemangku Kepentingan	41%	83%	42%
Rata-Rata	48,9%	84,2%	35%

3.4. Pelaporan dan Rencana Tindaklanjut

Tim menyusun laporan kegiatan pengabdian dengan melakukan klasifikasi tingkat pemahaman peserta dan identifikasi potensi rencana tindaklanjut dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan anak putus sekolah.

Data menunjukkan bahwa tingkat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi, tertinggi berada pada aspek “Strategi Pencegahan Kolaboratif Pemangku Kepentingan”, disusul pemahaman atas “Dampak Anak Putus Sekolah”, dan selanjutnya “Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak. Karena temuan kegiatan ini baru bersifat temuan pemahaman, maka dari data tersebut di atas selajutnya dirumuskan rencana tindaklanjut kegiatan yaitu pembentukan dan penguatan komunitas pendidikan pada setiap desa untuk menilai implementasinya di desa masing-masing. Selain itu, dapat pula dilakukan identifikasi dan pengkajian secara mendalam faktor faktor lain penyebab terjadinya anak putus sekolah, guna menetapkan program strtagis upaya penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Buton.

PEMBAHASAN

Temuan kegiatan ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator materi, yang bermakna bahwa kegiatan PkM ini berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Penerapan metode penyampaian materi yang mengombinasikan ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan studi kasus serta didukung pemanfaatan bahan tayang yang memadai terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.

Peningkatan tertinggi terdapat pada aspek strategi pencegahan kolaboratif pemangku kepentingan sebesar 42%, yang mengindikasikan bahwa masyarakat mulai menyadari bahwa permasalahan anak putus sekolah tidak dapat diselesaikan secara individual, melainkan memerlukan sinergi berbagai pihak terkait. Selain itu, peningkatan pemahaman tentang dampak anak putus sekolah diperoleh sebesar 36%, yang berarti bahwa masyarakat menyadari adanya konsekuensi jangka panjang bagi anak putus sekolah, yang mengarah pada risiko pengangguran, kemiskinan, maupun perilaku menyimpang. Sementara itu, aspek peran orang tua dalam pendidikan anak pada dasarnya telah memperoleh pemahaman tertinggi yakni 57% saat pree test, dan 90,1% saat post test atau meningkat

sebesar 33,5%. Hal ini menunjukkan bahwa peserta pada prinsipnya memahami adanya peran keluarga sebagai faktor kunci dalam keberlanjutan pendidikan anak.

Secara keseluruhan, rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 48,9% pada pre-test menjadi 84,2% pada post-test, atau mengalami peningkatan sebesar 35%. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan PkM memberikan dampak positif dan berpotensi berkontribusi dalam upaya menurunkan angka anak putus sekolah di Desa sasaran lingkup Kabupaten Buton.

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa peran kolaboratif seluruh pihak pemangku kepentingan terkait terhadap peningkatan partisipasi sekolah bagi anak sangat diperlukan. Hal ini senada dengan temuan pengabdian yang menjelaskan bahwa peran pendidikan dapat terlaksana dengan baik bila ada peran dorongan atau motivasi dari orangtua, masyarakat atau lingkungan sekitar (Haekal Masarilharom et al., 2024)

SIMPULAN

Kegiatan ini dinilai cukup efektif meningkatkan pemahaman masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Secara kuantitatif, rata-rata tingkat pemahaman peserta mengalami peningkatan dari sekitar 48,9% sebelum kegiatan dan menjadi 84,2% setelah kegiatan, atau meningkat sebesar 35%. Peningkatan pemahaman tersebut mencakup aspek pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, dampak negatif anak putus sekolah, peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak, kemampuan mengelola faktor sosial dan budaya yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan, serta pemahaman tentang pentingnya strategi pencegahan secara kolaboratif pemangku kepentingan terkait. Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek strategi pencegahan kolaboratif, yang menunjukkan tumbuhnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan anak putus sekolah.

SARAN

Berdasarkan temuan ini, maka direkomendasikan beberapa saran kepada pemangku kepentingan terkait. Pemerintah desa, diharapkan dapat menjadikan pendidikan anak sebagai prioritas pembangunan desa melalui penguatan program pencegahan anak putus sekolah, pengalokasian anggaran pendukung, serta peningkatan koordinasi dengan sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat. Orang tua, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya pendidikan anak dengan memberikan dukungan, motivasi, dan pengawasan belajar, serta mendorong anak untuk kembali bersekolah atau mengikuti pendidikan alternatif. Kepala Sekolah, diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang ramah dan inklusif, memperkuat kerja sama dengan orang tua dan pemerintah desa, serta mengembangkan program penjangkauan bagi anak berisiko putus sekolah. Guru, diharapkan dapat berperan aktif sebagai pendidik dan pendamping dengan menerapkan pembelajaran yang menarik, mengenali risiko putus sekolah sejak dini, dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Dan Pemerhati Pendidikan di Desa, diharapkan menjadi penggerak kesadaran masyarakat melalui kegiatan pendampingan, advokasi, dan kampanye pentingnya pendidikan anak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M., Kodri, A., Hendrik, M., & Juniawan, F. P. (2024). Strategi Mengatasi Anak Putus Sekolah Berbasis Edukasi Dan Bermain Peran Di Desa Simpang Tiga, Bangka Barat. *Communnity Development Journal*, 5(3), 5776–5783.
- Afrianti, D. (2024). Analysis of Student Dropout Potential Using the Multinomial Naive Bayes Algorithm. *Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining (IJAIDM)*, 7(2), 553–560. <https://doi.org/10.24014/ijaidm.v7i2.32316>

- Ailsyah Putri Oktaviani, & Adi Soesiantoro. (2023). Upaya Penanganan Anak Putus Sekolah Dengan Program Kejar Paket PKBM Di Kelurahan Pucang Sewu. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(4), 335–344. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.718>
- Alves, V. M., & Bataha, K. (2022). Peran Fasilitator Puspaga Dalam Upaya Penanganan Kasus Anak Putus Sekolah (Studi Kasus Kelurahan Dupak). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1483–1490.
- Andani, B. W., Mustari, M., Alqadri, B., & Sawaludin. (2023). *UPAYA PENANGGULANGAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI KAMPUNG POLAK PENYAYANG DESA MASBAGIK SELATAN B. 08*, 3871–3880.
- Haekal Masarilharom, A., Kholiq, F., Fauzi Hidayat, A., Ferdy Firdaus Sudrajat, M., Kartika, F., Ardiana Putra, D., ... Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, F. (2024). Sosialisasi Pentingnya Pendidikan untuk Mengurangi Tingkat Putus Sekolah di Desa Cibareno. *Jurnal Pengabdian Dinamika*, 11(1), 10–18. <https://doi.org/10.62870/dinamika.v11i1.30040>
- Hajrani, S., & Batia, L. (2021). *Parent Economy and Its Impact on Child Education In The Bajo Tribe In Marobo Village*. 6(1), 132–141.
- Hamdanesti, R. (2025). *Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan bagi Anak-Anak Kurang Mampu* (Vol. 3).
- Kemensesneg, R. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, 69–73. Retrieved from [https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf%0Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation_society_and_inequalities\(lsero\).pdf%0Ahttps://www.quora.com/What-is-the](https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf%0Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation_society_and_inequalities(lsero).pdf%0Ahttps://www.quora.com/What-is-the)
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Kusnady Tabsir, M. (2022). Peran Anak Usia Sekolah Dalam Ekonomi Keluarga di Madrasah Tsanawiah Negeri 7 Bulukumba. *Al-Mutsila*, 4(2), 90–102. <https://doi.org/10.46870/jstain.v4i2.261>
- Lestari, B. Y. A., Kurniawan, F., & Ardi, B. R. (2020). Penyebab tingginya anak putus sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD). *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 4(2), 299–308.
- Mappapa, P. L. (2025). *Data Kemendikdasmen, Angka Putus Sekolah Tertinggi Terjadi di SMK*. p. 4. Retrieved from <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7822286/data-kemendikdasmen-angka-putus-sekolah-tertinggi-terjadi-di-smk>
- Nuraeni, E., & Setiawan, U. (2023). *SOSIALISASI PENCEGAHAN PUTUS SEKOLAH PAUD DENGAN MELIBATKAN ORANG TUA DI KAMPUNG TEGAL HEAS*. Retrieved from <https://doi.org/10.30605/jurnal.pendidikan.v1i1.30040>
- Peraturan Daerah. (2025). *Perda Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045*.

- Ranti, K., Atmadja, N. B., & Sendratari, L. putu. (2019). Upaya Pencegahan Anak Putus Sekolah di SMP Negeri 1 Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali. *E-Journal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(1), 12–22.
- RI, P. (2017). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 39–45. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v2i1.48>
- Ridwan, R., Irawaty, I., & Momo, A. H. (2020). FAKTOR PENYEBAB ANAK PUTUS SEKOLAH (Studi di Desa Mapila Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana). *Selami Ips*, 12(1), 62. <https://doi.org/10.36709/selami.v12i1.10838>
- Syahrianti, W. O. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Dan Cara Penanggulangannya. *Jurnal Attening- Universitas Hahu Oleo*, 1(1), 113–124.
- Wahyuni, A. T., Puspitasari, I., Saidah, L., Acep Purnawijaya Putra, & Elis Agustin. (2023). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Wajib Belajar 12 Tahun Melalui Seminar Pendidikan di Desa Jayasari. 4(1), 446–453. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i1.867>
- Wardani, Y. D., Ruja, I. N., Towaf, S. M., Efendi, B. M. S., & Kurniawan, N. C. (2021). Analisis penyebab anak putus sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS)*, 1(12), 1294–1301. <https://doi.org/10.17977/um063v1i12p1294-1301>